KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JI. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Nomor : IP.105/1/6/ITJEN/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Tiga lembar
Hal : Undangan Sosialisasi

Jakarta, 09 September 2026

Yth. Daftar Terlampir.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor HK.01.00/SE-2/K/SU/2024 tentang Kebijakan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, BPKP selaku pembina pengendalian internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pembinaan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Strategi Konsolidasi Penilaian Komponen IEPK dalam SPIP Terintegrasi pada Kementerian Perhubungan Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud komitmen dan dukungan terhadap upaya peningkatan efektivitas pengendalian korupsi serta optimalisasi penilaian komponen IEPK dalam SPIP Terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, akan diselenggarakan kegiatan **Sosialisasi Penyusunan *Fraud Risk Assessment* di Lingkungan Kementerian Perhubungan**.

Untuk itu mohon perkenan Bapak/Ibu untuk hadir fisik maupun daring pada kegiatan sosialisasi dimaksud yang akan diselenggarakan secara *hybrid* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2026
Waktu : 09.00 – 13.00 WIB

Hadir Fisik (Luring)

Tempat : Ruang Nanggala, Gedung Cipta Lt.7, Kementerian Perhubungan
Peserta (2 orang) : Pemilik Risiko dan Koordinator UPR tingkat Eselon II (harap untuk tidak diwakilkan)

Hadir Virtual (Daring)

Tempat : *Virtual Zoom Meeting*
Meeting ID : 961 7806 4323
Pascode : pdti1509
Peserta : Para Pemilik Risiko Level Unit Kerja Mandiri

Untuk mempermudah koordinasi dan konfirmasi, dapat menghubungi narahubung kami atas nama Iwan Novandi (Nomor HP 082258309647). Materi dan virtual *background* dapat diunduh pada tautan berikut https://linktr.ee/sosialisasipenyusunanFRA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Inspektur Jenderal
Inspektur I,

Marwanto Heru Santoso, S.T., M.T., QGIA.
NIP. 197003281998031002

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Dinas
Nomor : IP.105/1/6/ITJEN/2026
Tanggal : 09 September 2026

Kepada Yth:

A. HADIR FISIK (LURING)

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN;
6. Kepala Biro Umum;
7. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
9. Direktur Lalu Lintas Jalan;
10. Direktur Angkutan Jalan;
11. Direktur Prasarana Transportasi Jalan;
12. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan;
13. Direktur Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
15. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
16. Direktur Kepelabuhanan;
17. Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
18. Direktur Kenavigasian;
19. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran;
20. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
21. Direktur Angkutan Udara;
22. Direktur Bandar Udara;
23. Direktur Keamanan Penerbangan;
24. Direktur Navigasi Penerbangan;
25. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
26. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
27. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
28. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
29. Direktur Sarana Perkeretaapian;
30. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
31. Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
32. Direktur Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda;
33. Direktur Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda;
34. Direktur Multimoda;
35. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
36. Inspektur I;
37. Inspektur II;
38. Inspektur III;
39. Inspektur IV;
40. Inspektur Investigasi;
41. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
42. Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
43. Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
44. Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

45. Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
46. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
47. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
48. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
49. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
50. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan;
51. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
52. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
53. Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
54. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;
55. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
56. Ketua Mahkamah Pelayaran;
57. Sekretaris Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

B. HADIR FISIK (DARING)

1. Seluruh UPT/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Seluruh UPT/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Seluruh UPT/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Seluruh UPT/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Seluruh UPT/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat Dinas
Nomor : IP.105/1/6/ITJEN/2026
Tanggal : 09 September 2026

SUSUNAN ACARA
Sosialisasi Penyusunan *Fraud Risk Assessment* di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Jakarta, 15 September 2026

NO	Waktu	Agenda	Keterangan
1.	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2.	09.00 – 09.20	Pembukaan: a. Sambutan dan Arahan b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya c. Doa	Sambutan dan Arahan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
3.	09.20 – 10.20	Penyampaian Paparan terkait Konsep *Fraud Risk Assessment, SPIP, dan IEPK*	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4.	10.20 – 11.00	Penjelasan metodologi dan praktik penyusunan *Fraud Risk Assessment*	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
5.	11.00 – 12.00	Simulasi: Keterjadian *fraud* barjas di Lingkungan Kementerian Perhubungan disandingkan dengan risiko yang sudah diidentifikasi	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
6.	12.00 – 12.45	Diskusi/Tanya Jawab	Seluruh peserta
7.	12.45 – 13.00	Penutup	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).